

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS DI KPU PROVINSI JAWATENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas sebagai pemilih ataupun dipilih dalam kontestasi politik khususnya pada pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah beserta regulasi dan kendala serta solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan permasalahan terkait bagaimana pengaturan mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas, upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di KPU Provinsi Jateng apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 serta apakah ada kendala yang di hadapi. Data yang di gunakan berupa data primer dan sekunder. Metode analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ada banyak regulasi yang mengatur mengenai penyandang disabilitas namun minim yang mengatur mengenai hak politik mereka. Pemenuhan hak politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sejauh ini tidak terdapat kendala dari pihak KPU itu sendiri. Kendala justru muncul dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut. Kemudian solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan peninjauan dan pengkajian ulang terhadap regulasi hak politik bagi penyandang disabilitas dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 serta peningkatan inovasi dari KPU untuk melakukan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran pentingnya hak politik bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : KPU Provinsi Jateng, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

FULLFILLMENT OF POLITICAL RIGHT FOR DISABILITIES ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 2016 (CASE STUDY IN CENTRAL JAVA PROVINCIAL KPU) this study aims to find out how the fulfilment of political rights for person with disabilities as voters or elected in political contestation, especially in the 2019 elections carried out by the Central Java Provincial KPU and it's regulations and constraints and solutions. This research is a descriptive empirical judicial research.

The type of data used in this study is descriptive. With problem related to how the regulation regarding political rights for persons with disabilities, efforts to fulfil political rights for persons with disabilities in Central Java Provincial KPU wether it is in accordance with Law Number 8 of 2016 and wether there are obstacles encountered.

The data used are primary and secondary data. Data analysis method used is qualitative analysis. Based on the results of research that has been done, it was concluded that there are many regulations governing persons with disabilities but minimal that govern their political rights. Fulfilment of political rights carried out by the Central Java Provincial KPU has been going well according to the provisions in Law Number 8 of 2016 as well as increasing innovation from the KPU to conduct socialization and increase awareness of the importance of political rights for persons with disabilities.

Keywords: *Central Java Provincial KPU, Political Rights of Persons with Disabilities*